

Demokrasi dan Kebenaran

*Otto Gusti Madung**

Pendahuluan

Bapak konstitusi dan mantan Presiden Amerika Serikat, James Madison (1751-1836), pernah berujar: “all governments rest on opinion” – “semua rezim bergantung pada opini publik”.¹ Imbauan Presiden Jokowi (Jokowi) pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2021 lalu dapat dimengerti dalam konteks ini. Jokowi meminta rakyat lebih aktif untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintah guna memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menghindari maladministrasi.² Harapannya, tentu kritik dapat membentuk opini publik yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah dalam memutuskan dan menjalankan kebijakan publik.

Namun harus disadari bahwa opini publik itu bukan hanya milik rezim demokratis. Seorang pemimpin totaliter atau tiran sekalipun

*Otto Gusti Madung adalah Pengajar Filsafat Politik dan HAM di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, Ledalero, Maumere, Flores NTT. Menyelesaikan program doktoral di bidang filsafat tahun 2008 di “Hochschule für Philosophie, München, Jerman dengan judul disertasi *Politik und Gewalt. Giorgio Agamben und Jürgen Habermas im Vergleich – Politik dan Kekerasan: Sebuah Studi Perbandingan tentang Giorgio Agamben dan Jürgen Habermas*. Disertasi ini diterbitkan di Utz Verlag, München 2008. Menulis dan menerbitkan sejumlah buku, di antaranya *Politik: Antara Legalitas dan Moralitas* (Penerbit Ledalero, 2009), *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia?* (Penerbit Ledalero, 2011), *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filsafat Politik* (Penerbit Ledalero, 2013). Giat menulis di media massa baik lokal pun nasional serta menulis artikel untuk sejumlah jurnal ilmiah. Dapat dihubungi melalui alamat ottomadung@gmail.com.

¹D. Pan, “Introduction”, *TELOS 192* (Fall 2021), 2020 (Doi:10.3817/0920192003).

²E. Adyatma, “Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Mengkritik dan Memberi Masukan”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1430919/jokowi-minta-masyarakat-lebih-aktif-mengkritik-dan-memberi-masukan/full&view=ok>.

tidak mungkin dapat bertahan dalam kekuasaan tanpa dukungan opini publik yang diikat oleh kesadaran kolektif atau ideologis. Keberlangsungan dukungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan sang pemimpin untuk merawat legitimasi idealismenya. Di sini kebenaran dan kekuasaan saling berkelindan. Rezim nasional sosialisme (Nazi) Jerman, misalnya, mempertahankan kekuasaannya dengan merujuk pada sebuah idealisme tentang “kemurnian ras” Aria; yang tentu saja telah mendatangkan musibah kemanusiaan bagi jutaan orang Yahudi yang dibantai. Pemerintahan Orde Baru dapat bertahan lama dengan merawat memori kolektif ketakutan pada hantu bernama komunisme.

Setiap kebenaran dalam tatanan sosial selalu berbenturan dan berkompetisi dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Maka, relasi kebenaran dengan kekuasaan selalu memicu perdebatan. Di satu sisi, setiap kebenaran mengklaim absolutisme dalam tafsiran tentang dunia dan relasi manusia dengan dunia. Di sisi lain, pluralitas kebenaran justru mencegah adanya kecenderungan monopoli klaim kebenaran tersebut yang melahirkan totalitarianisme. Bahkan idealisme kebenaran normatif seperti paham universal hak-hak asasi manusia (HAM) harus berkompetisi dengan pandangan normatif tatanan global lainnya.

Kompetisi diskursif tentang klaim-klaim kebenaran tersebut hanya mungkin berlangsung secara *fair* dan setara dalam sebuah sistem demokrasi. Di dalam sistem monarki dan rezim totalitarian, pada umumnya tidak terdapat deliberasi tentang kebenaran. Yang ada hanyalah monopoli atas kebenaran yang berpijak di atas dogma “*the king can do no wrong*”.

Tulisan ini bertujuan menunjukkan relasi antara kebenaran dengan demokrasi dan menolak asumsi bahwa diskursus demokratis hanya merupakan ekspresi kepentingan ekonomis para pemburu rente, ungkapan identitas sektarian dan kepentingan kelas semata. Kebenaran yang dimaksudkan di sini bukan kebenaran esensialistis yang membuka ruang bagi hegemoni, tapi model kebenaran proseduralistis seperti diperkenalkan dalam konsep demokrasi deliberatif.

Aporia Epistemologi Demokrasi dan Kondisi Indonesia

Sekitar 2.500 tahun yang lalu, Sokrates (470–399 BC) menolak demokrasi, sebab demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang irasional dan tidak kompatibel dengan kebenaran.³ Demokrasi, demikian Sokrates, memungkinkan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Salah seorang murid Sokrates yakni Plato (424/423 BC–348/347 BC) meneruskan pandangan gurunya. Pandangannya tentang politik dilukiskannya dalam alegori gua.⁴ Alegori gua berkisah tentang sejumlah tahanan yang diikat dengan rantai pada dinding gua yang gelap. Kepala para tahanan tidak dapat menoleh ke kiri maupun ke kanan. Mata mereka hanya bisa terarah ke dinding gua yang memantulkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu berasal dari benda-benda yang dipikul ke sana ke mari di dalam gua. Ada api unggun bernyala yang memantulkan bayang-bayang pada dinding gua. Karena para tahanan itu hidup di dalam gua sejak lahir, mereka menyangka kalau bayang-bayang tersebut adalah realitas sejati. Mereka telah menjadi pakar bayang-bayang palsu.

Pada suatu hari, salah seorang tahanan dibebaskan dan dituntun keluar dari gua. Perjalanan meninggalkan gua sangat sulit. Ia melewati benda-benda, api unggun bernyala, lalu keluar dari gua. Matanya tersilau, ia tak dapat melihat apa-apa, semuanya gelap. Kemudian ia melihat pantulan cahaya di siang hari. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia mulai terbiasa dengan terang dan dapat melihat cahaya mata hari. Mata hari adalah sumber segala kehidupan dan pertumbuhan, syarat pengetahuan dan simbol dari ide kebaikan. Namun, kisah tidak berakhir di sini. Bekas tahanan tadi kembali ke dalam gua. Ia coba menjelaskan kepada para tahanan yang masih terbelenggu bahwa apa yang kelihatan di dinding gua bukan realitas sesungguhnya, melainkan hanya bayang-bayang dari fakta sesungguhnya. Karena sudah terlanjur menjadi pakar bayang-bayang dengan titik pijak pada epistemologi palsu, para tahanan tersebut tidak percaya pada cerita rekan mereka itu.

³H. Ottmann, *Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Homer bis Sokrates*, Band 1/1 (Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2001).

⁴Platon, *Der Staat*, terj. Otto Apelt (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989).

Ada banyak tafsiran tentang alegori gua, salah satunya ialah tafsiran di bidang politik. Dalam bidang politik, alegori gua menggambarkan aporia epistemologi demokrasi. Kebenaran tidak selalu akrab dengan kekuasaan. Sokrates adalah contohnya. Kematian Sokrates pada tahun 399 SM menunjukkan bagaimana demokrasi secara tidak adil menghukum mati satu-satunya warga negara yang adil. Demokrasi membunuh ikon kebenaran. Pada Abad ke-20, sejarah terulang lagi ketika Hitler dipilih secara demokratis di Jerman dan kemudian membunuh enam juta orang Yahudi. Demokrasi dan kebenaran tampaknya tak dapat dipertemukan.

Dewasa ini, sekurang-kurangnya terdapat tiga paradigma yang menolak peran kebenaran di dalam demokrasi.⁵ *Pertama*, model netralitas negara yang dapat dikaitkan dengan sejumlah pemikir seperti Thomas Hobbes dan Carl Schmitt. Hakikat yang politis menurut Hobbes adalah konsentrasi segala instrumen kekuasaan pada seorang pemimpin yang berdaulat. Tujuannya ialah untuk menciptakan perdamaian dan mengatasi kondisi *bellum omnium contra omnes*—perang semua melawan semua—yang mewarnai posisi asali pranegara.⁶ Negara Hobbesian tidak membiarkan adanya kebenaran tandingan di samping kekuasaan negara. Karena itu, Hobbes menyebut negara sebagai *deus mortalitatis*. Negara itu mahakuasa dan bersifat infalibel. *He can do no wrong!* (*ibid.*). Legitimasi hukum juga tidak berpijak pada kebenaran yang merupakan hasil dari sebuah proses diskursus demokratis, tapi bersumber dari kekuasaan. Atau dalam ungkapan Hobbes sendiri: “*Auctoritas, non veritas facit legem*”—“Bukan kebenaran, melainkan kekuasaan menciptakan hukum”. Sejumlah ahli berpandangan bahwa perkembangan politik Indonesia sedang menuju ke arah totalitarian.⁷ Hal ini diperkuat oleh laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada level terendah dalam 14 tahun terakhir dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kategori demokrasi cacat.⁸

⁵J. Nida-Rümelin, *Demokratie und Wahrheit* (München: Beck Verlag, 2006).

⁶T. Hobbes, *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines Kirchlichen und bürgerlichen Staates*, Iring Fischer (ed.), terj. Walter Euchner (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984).

⁷T. Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 2018.

⁸T. Trinugroho, “Tajuk Rencana: Momentum Merevisi UU ITE”, dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/23/momentum-merevisi-uu-ite/>.

Pada masa pandemi ini, tendensi totalitarian tersebut antara lain ditunjukkan lewat watak antisains yang dipertontonkan oleh rezim yang berkuasa. Kiranya masih segar dalam ingatan publik kasus yang menimpa epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, yang akun media sosialnya dibajak setelah ia getol memberikan catatan kritis atas riset tentang obat Covid-19 yang dikembangkan bersama oleh TNI Angkatan Darat, BIN dan Universitas Airlangga.⁹ Kritikan berbasis data ilmiah tidak ditanggapi dengan argumentasi akademik tapi dengan arogansi kekuasaan. Dalam rezim antisains, peran akademisi tidak lebih dari aksesori pemberi legitimasi bagi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.

Kedua, anggapan kaum libertarian atau neoliberal bahwa debat politik hanya menciptakan kegaduhan, karena itu harus ditransformasi dan dikendalikan oleh rasionalitas ekonomi. Paradigma libertarian menggantikan politik dengan pasar.¹⁰ Lewat produk hukum, negara harus menjamin agar pasar berfungsi dengan baik. Pada prinsipnya, negara tidak pernah boleh mengintervensi kerja pasar. Di sini terjadi proses netralisasi atau penjinakan negara dan tindakan politik oleh pasar.

Kecenderungan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menghindari “kegaduhan” demi iklim investasi yang kondusif sesungguhnya merupakan ekspresi dominasi pasar neoliberal dan netralisasi negara serta tindakan politik. Hal ini bahkan berujung pada aksi represif aparat keamanan terhadap masyarakat sipil dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) melaporkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2021 UU ITE telah menjerat 375 warganet.¹¹ Sulit untuk percaya bahwa Pemerintah tidak melakukan *abuse of power* dalam penerapan UU ITE. Sebab mayoritas korban penerapan pasal karet undang-undang ini adalah jurnalis, aktivis, dan warga kritis yang selalu menyuarakan kritik terhadap kekuasaan. Masih segar dalam memori publik kasus yang menimpa peneliti independen kebijakan publik, Ravigo Patra. Ravigo dikenal

⁹P.H. Wiratraman, “Menjaga Kebebasan Akademik”, *Kompas*, 21 Desember 2020.

¹⁰J. Nida-Rümelin, *Demokratie und...*, *op.cit.*

¹¹T. Trinugroho, “Tajuk Rencana...”, *op.cit.*

getol mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia akhirnya ditangkap polisi setelah satu hari sebelumnya *WhatsApp* Ravigo dibajak. Catatan buram ini membuat imbauan Presiden Jokowi agar masyarakat sipil lebih giat lagi mengemukakan kritik guna memperbaiki kinerja Pemerintah ditanggapi secara sinis oleh masyarakat luas. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) melakukan riset di media sosial dan menemukan 126.970 percakapan internet seputar permintaan kritik dari Jokowi, di mana 44 persen menyampaikan sentimen negatif atas pernyataan presiden tersebut.¹²

Ketiga, paradigma politik identitas (Nida Rümelin). Di sini corak deliberatif diskursus politik dipandang sebagai kamufase untuk menutupi kepentingan-kepentingan identitas sektarian. Dewasa ini, praktik politik identitas terutama muncul lewat gelombang populisme yang sedang melanda politik global, juga politik di Tanah Air. Populisme adalah sebuah gerakan politik yang merepresentasikan kepentingan *the people* (orang kebanyakan) yang tertindas sebagai protes terhadap sekelompok kecil *the elites* yang berkuasa, korup dan dipandang tidak bermoral. *The people* yang dipersepsikan sebagai kelompok homogen mengalami proses peminggiran dan pemiskinan karena kegagalan demokrasi liberal sekular menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Ruang yang ditinggalkan oleh demokrasi teknokratis liberal ini diisi oleh para pemimpin populis dengan menggunakan isu-isu politik identitas seperti agama, etnisitas, ras dan nasionalisme sempit untuk menggalang dukungan politik.

Populisme selalu diwarnai dengan sikap antipluralisme dan corak iliberalisme. Antipluralisme terungkap dalam penolakan terhadap deliberasi publik sebagai jalan untuk meraih kebenaran dalam politik dan juga sikap anti-intelektualisme yang membungkam kebebasan berpendapat. Warna iliberalisme antara lain terungkap lewat gerakan politik antiorang asing dan anti-Islam di Eropa. Sementara itu, di Indonesia corak iliberalisme tersebut terbaca lewat gerakan pengarusutamaan moralitas Islam konservatif dan menguatnya gerakan ultra-nasionalisme reaksioner sempit dalam diskursus

¹²Riset LP3ES, "Netizen Meragukan Permintaan Kritik", dalam <https://barisan.co/riset-lp3es-netizen-meragukan-permintaan-kritik-jokowi/?amp>.

dan praktik politik.¹³ Corak iliberalisme ini memperlihatkan bahwa populisme telah mengukudeta demokrasi untuk meraih dukungan politik elektoral dengan mengabaikan substansi demokrasi, yakni hak-hak liberal (hak kelompok minoritas), pluralism, dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajah populisme dengan corak demokrasi iliberal kembali menghadirkan tirani demokrasi mayoritarian yang telah menghabisi Sokrates 2500 tahun silam dan jutaan orang Yahudi pada Abad ke-20.

Untuk konteks Indonesia menurut Vedi Hadiz, corak iliberalisme demokrasi yang tampak lewat dominasi kedua model konservatisme di atas telah mengikis tiga pilar penting demokrasi: hak-hak liberal, hak-hak social, dan hak-hak kolektif. Hal ini lebih lanjut mendatangkan nasib buruk bagi kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok LGBT, minoritas agama, perempuan dan orang-orang yang dicap sebagai komunis. Melemahnya ketiga pilar demokrasi di atas membuat demokrasi Indonesia dan juga gerakan populisme sebagai kritik terhadap demokrasi, terperosok ke dalam bola permainan di tengah pertarungan intraoligarkis.

Demokrasi Deliberatif dan Kebenaran

Untuk mengatasi tirani mayoritarian dalam praktik demokrasi yang dewasa ini muncul lewat fenomena politik populisme, kebenaran harus menjadi titik pijak epistemis dan normatif dalam diskursus politik di ruang publik. Urgensi kebenaran dalam politik sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Plato. Karena itu, Plato menganjurkan model filsuf (pencinta kebijaksanaan dan kebenaran) sebagai raja. Dalam karyanya *Politeia* (Republik) Plato menulis:

Jika para filsuf tidak menjadi raja di negara-negara atau para raja dan pemangku kekuasaan politik tidak mempelajari filsafat secara serius dan mendasar (*gründlich*) dan keduanya yakni filsafat dan kekuasaan negara tak berkelindan satu sama lain, maka bencana tanpa akhir akan menimpa negara-negara dan juga seluruh umat manusia.¹⁴

¹³Vedi R. Hadiz, "Indonesian Politics in 2017. Indonesias Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 2017.

¹⁴Platon, *Der Staat...*, *op.cit.*

Awasan Plato tidak keliru. Menguatnya politik identitas dan tampilnya pemimpin populis yang menyebar kebohongan dan memanipulasi kebencian rakyat demi dukungan elektoral adalah musibah yang tengah melanda umat manusia. Musibah datang ketika politik dusta merebak dan kebenaran dijauhkan dari arena politik.

Bagaimana konsep filsuf raja Plato sebagai pemegang tunggal kebenaran dapat disesuaikan dengan iklim demokrasi yang diwarnai dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan? Kesetaraan mengandaikan bahwa tak ada pemegang kebenaran tunggal dalam demokrasi dan setiap orang dalam iklim kebebasan dapat berdebat untuk mencari kebenaran. Pertanyaan ini pernah diajukan oleh Hannah Arendt. Bertolak dari konsep kebenaran platonis, Arendt akhirnya menganggap kebenaran termasuk kebenaran faktual sebagai musuh demokrasi. Sebab kebenaran menurut Arendt selalu bersifat despotik. *“It may be the nature of the political realm to be at war with truth in all its forms, and hence to the question of why a commitment even to factual truth is felt to be anti-political attitude”*.¹⁵ Arendt berpandangan bahwa klaim kebenaran merupakan hambatan bagi diskusi dan membungkam kebebasan berpendapat. Sementara politik menurut Arendt selalu hidup dari komunikasi dan benturan pandangan. Akan tetapi, sesungguhnya bukan kebenaran dan fakta yang membungkam komunikasi atau perdebatan dalam politik. Kebenaran tidak berseberangan dengan politik dan demokrasi, melainkan pandangan Arendt tentang kebenaran platonis sebagai sesuatu yang singular dan final. Karena itu, jika kita memahami klaim kebenaran sebagai sesuatu yang *falibel* dan dapat dikoreksi kembali dalam proses diskursus,¹⁶ komunikasi dan diskursus dalam politik tak pernah berakhir. Itulah esensi kebenaran dalam perspektif demokrasi deliberatif.¹⁷

Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang partisipasi warga

¹⁵H. Arendt, “Truth and Politics”, dalam H. Arendt (ed.), *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought* (London: Penguin Books, 1954).

¹⁶J. Habermas, *Zwischen Naturalismus und Religion* (Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag, 2005).

¹⁷S. Chambers, “Truth, Deliberative Democracy and the Virtues of Accuracy: Is Fake News Destroying the Public Sphere?”, *Political Studies*, 69(1), 2021 (DOI: 10.1177/0032321719890811).

untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan. Paradigma demokrasi deliberatif adalah praksis politik demokratis yang sesungguhnya, sebab ia meradikalisasi demokrasi itu sendiri. Dari sudut pandang paradigma demokrasi deliberatif, proses diskusi politik publik tentang rancangan sebuah undang-undang dan keputusan politik tidak ditafsirkan sebagai ekspresi politik identitas, melainkan ungkapan sebuah deliberasi tentang alasan mengapa sebuah keputusan politik seharusnya diambil. Radikalisasi demokrasi terungkap dalam kesungguhan untuk memperhatikan syarat-syarat dan implikasi dari praktik demokrasi deliberatif. Syarat-syarat dimaksud misalnya, setiap peserta diskursus publik saling menghargai, saling percaya bahwa mereka mampu berargumentasi dan menghargai satu sama lain sebagai individu yang otonom dan setara.¹⁸

Demokrasi deliberatif mendorong agar terjadi proses penguatan argumentasi di ruang publik, sebab argumentasi adalah substansi dari demokrasi. Tanpa argumentasi tak ada demokrasi. Yang ada hanyalah pertarungan kepentingan-kepentingan. Demokrasi tanpa argumentasi yang berpijak pada kebenaran adalah tirani mayoritas yang pernah menghukum mati Sokrates dan mengusung Hitler ke singgasana kekuasaan. Tirani mayoritas yang sama sesungguhnya sedang dihidupkan kembali dewasa ini oleh para politisi populis yang mempromosikan demokrasi tanpa liberalisme.

Argumentasi atau deliberasi dalam demokrasi substantif selalu memiliki titik pijak penilaian-penilaian rasional secara empiris dan normatif. Artinya, deliberasi selalu merujuk pada pernyataan deskriptif tentang apa yang riil secara empiris dan proposisi preskriptif tentang apa yang seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian, argumentasi bukan sekadar ekspresi permainan akrobat kepentingan-kepentingan (ekonomi atau identitas sektarian), melainkan berisi proposisi-proposisi kebenaran. Demokrasi deliberatif merupakan model tandingan dan sekaligus kritikan atas rezim antisains yang sedang marak dipraktikkan di Indonesia dan dipromosikan oleh banyak pemimpin populis pada tingkat global.

¹⁸J. Habermas, *Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie* (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996).

Lebih jauh, demokrasi tanpa kebenaran adalah hampa dan akan terperosok ke dalam desisionisme. Desisionisme berarti keputusan politik diambil atas pertimbangan kekuasaan semata, tanpa basis argumentasi yang benar dan titik pijak ketepatan (*Richtigkeit*) normatif (moral) yang kokoh. Untuk menjamin kualitas argumentasi tersebut, ruang publik politik sangat dibutuhkan. Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik dan privat, institusi pendidikan dan forum-forum diskusi.

Diskursus publik adalah prasyarat kultural dasariah sebuah demokrasi yang sungguh hidup. Sebagai prasyarat kultural, deliberasi publik berperan menjadi kompas penunjuk arah sekaligus kontrol atas proses pembuatan regulasi dan tindakan eksekutif. Formasi deliberasi publik ini membutuhkan kerja sama antara politik (negara), media massa, dan masyarakat sipil. Dari pihak politik dituntut transparansi tingkat tinggi dan kewajiban menyampaikan argumentasi publik rasional untuk setiap kebijakan. Pengerahan *buzzer* adalah racun bagi ruang publik, memperkuat fenomena *echo chambers* dan polarisasi diskursus publik. Kontribusi media massa ialah menyediakan *platform* diskusi bagi masyarakat luas serta tidak membiarkan pandangannya diinstrumentalisasi untuk kepentingan kekuasaan. Untuk konteks Indonesia, hal ini menjadi persoalan serius, sebab sejumlah media massa (cetak dan elektronik) berafiliasi dengan para pengusaha yang juga menguasai partai politik, sehingga manipulasi ruang publik untuk kepentingan kekuasaan sangat rentan terjadi. Sementara itu, masyarakat sipil dituntut untuk menaruh minat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik (Nida Rümelin).

Bergesernya ruang deliberasi publik dari media massa *mainstream* ke jaringan media sosial dan media *online* dengan kualitas yang mencemaskan, menciptakan tantangan tersendiri bagi pembentukan kualitas demokrasi. Arus informasi dan data sering bergerak sesuai selera dan preferensi pengguna yang tak jarang menutup diri terhadap informasi dan pandangan yang lebih terpercaya dan berkualitas. Hal ini memunculkan apa yang dikenal dengan fenomena *echo chambers*. Inovasi teknologi ini tentu menghadapkan ruang publik politik dengan tantangan luar biasa. Dalam kaitan dengan fragmentasi

ruang-ruang diskursus, mulai bermunculan elemen-elemen ruang publik yang di satu sisi menampilkan karakter diskursus publik, tapi di sisi lain berlangsung di ruang-ruang otonom tanpa relasi satu dengan yang lain. Akibatnya ialah menguatnya fragmentasi sosial. Horizon bersama dalam memberikan kritik atau evaluasi atas proyek politik semakin menipis dan kabur. Formasi opini publik pun mengalami proses radikalisisasi berdasarkan efek dari polarisasi sosial.

Namun, di sisi lain, teknologi digital telah menyediakan sejumlah kemudahan untuk mengakses informasi dan terlibat dalam diskusi politik publik. Peluang ini dapat digunakan untuk merevitalisasi formasi opini publik dan proses pengambilan keputusan secara demokratis. Teknologi digital mendorong partisipasi dan deliberasi. Namun adanya pluralitas dan prinsip publisitas dalam proses diskursus di ruang virtual harus tetap dijamin, dan munculnya fenomena *echo chambers* serta fragementasi ruang diskursus harus dicegah atau dilarang.

Deliberasi publik adalah pertukaran argumentasi untuk mendukung keyakinan politik. Dengan demikian, keyakinan politik bukan sekadar preferensi subjektif, tapi berpijak pada fakta politis yang objektif baik secara empiris maupun normatif. Karena itu, perbedaan keyakinan politik akan melahirkan perdebatan politik di ruang publik, di parlemen dan komisi-komisi, pada level partai politik dan masyarakat sipil, di media massa dan ruang privat. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut biasa dan tidak bereskalasi menjadi tindakan kekerasan dan perang, sebab demokrasi berpijak pada prinsip kooperasi dan penentuan diri kolektif setiap individu yang bebas dan setara.

Kebenaran yang dimaksud dalam demokrasi deliberatif adalah kebenaran yang berpijak pada epistemologi *falibilisme*.¹⁹ Sebuah epistemologi yang tidak pernah melahirkan jawaban final tapi selalu terbuka untuk perdebatan baru. Epistemologi *falibilisme* bersifat inklusif. Ia melibatkan semua yang mampu menjelaskan sebuah persoalan dalam deliberasi publik. Proses diskursus dan pencarian

¹⁹J. Nida-Rümelin, *Die gefährdete Rationalität der Demokratie. Ein politischer Traktat* (Hamburg: Edition Körber, 2020).

argumentasi tandingan pada prinsipnya tidak mengenal batas-batas regional, etnis, dan kultural. Sedangkan praksis diskursus politis harus mengakui batas-batas tertentu. Namun itu tidak berarti keduanya berada pada relasi kontradiktoris.

Lebih jauh, epistemologi *falibilisme* berkelindan erat dengan konsep *toleransi sebagai respek*. Artinya, “saya juga mengakui sebuah argumentasi kendatipun argumentasi itu tidak sesuai dengan penilaian-penilaian yang saya yakini benar”. Itulah paradoks realisme keyakinan dunia kehidupan kita yang menyusup masuk hingga ke dalam politik dan ilmu pengetahuan. Realisme tersebut menuntut adanya epistemologi *falibilisme* serta pengakuan orientasi nilai toleransi dan inklusi. Bersikap kritis (skeptis) terhadap keyakinan sendiri dan menaruh respek terhadap pandangan yang berseberangan merupakan aspek esensial dari etos ilmu pengetahuan modern. Dalam sebuah masyarakat modern yang berorientasi pada nilai-nilai pencerahan (*Aufklärung*), etos ini tertanam kuat di dalam praksis komunikasi dunia kehidupan dan membentuk komunikasi politik. *Falibilisme* mendorong toleransi, sedangkan fundamentalisme kebenaran menciptakan intoleransi. Transformasi argumentasi menuju indikator kepentingan tidak akan menciptakan perdamaian, tapi sebaliknya mengubah deliberasi menjadi pertarungan kekuasaan ekonomi.

Penutup

Tulisan ini coba menjelaskan bahwa kebenaran adalah unsur hakiki dalam demokrasi. Artinya, perdebatan di ruang publik demokratis bukan sekadar ekspresi dari kepentingan ekonomi atau pertarungan politik identitas. Dari perspektif demokrasi deliberatif, diskursus di ruang publik sungguh-sungguh berpijak pada landasan epistemis dan normatif. Artinya, apa yang diperdebatkan memiliki rujukan pada fakta dan norma tentang apa yang seharusnya dijalankan. Dengan merujuk pada kebenaran, demokrasi tidak akan terperangkap di dalam bahaya tirani mayoritarian—seperti dipromosikan oleh para pemimpin populis yang mengukudeta demokrasi untuk kepentingan dukungan politik elektoral—dan mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri yakni penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara (liberalisme). Agar kebenaran dapat bersemi di dalam

demokrasi, iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijamin oleh negara dan watak anti-intelektualisme dan antisains harus dijaui.

Bibliografi

- Adyatma, E. 2021 (8 Februari). “Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Mengkritik dan Memberi Masukan”. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/1430919/jokowi-minta-masyarakat-lebih-aktif-mengkritik-dan-memberi-masukan/full&view=ok>.
- Arendt, H. 1954. “Truth and Politics”. Dalam H. Arendt (ed.), *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought*. London: Penguin Books.
- Chambers, S. 2021. “Truth, Deliberative Democracy and the Virtues of Accuracy: Is Fake News Destroying the Public Sphere?”, *Political Studies*. 69(1). Doi: 10.1177/0032321719890811.
- Habermas, J. 1996. *Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas, J. 2005. *Zwischen Naturalismus und Religion*. Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag.
- Hadiz, V. R. 2017. “Indonesian Politics in 2017. Indonesias Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3).
- Hobbes, T. 1984. *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines Kirchlichen und buergerlichen Staates*, Iring Fischer (ed.), terj. Walter Euchner. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Nida-Rümelin, J. 2006. *Demokratie und Wahrheit*. München: Beck Verlag.
- Nida- Rümelin, J. 2020. *Die gefährdete Rationalität der Demokratie. Ein politischer Traktat*. Hamburg: Edition Körber.
- Ottmann, H. 2001. *Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Hommer bis Sokrates*, Band 1/1. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler.
- Pan, D. 2020. “Introduction”, *TELOS 192* (Fall 2021). Doi:10.3817/0920192003.
- Platon. 1989. *Der Staat*, terj. Otto Apelt. Hamburg: Felix Meiner Verlag.
- Power, T. 2018. “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3).
- Riset LP3ES. 2021 (Februari 20). “Netizen Meragukan Permintaan Kritik

- Jokowi”. Dalam <https://barisan.co/riset-lp3es-netizen-meragukan-permintaan-kritik-jokowi/?amp>.
- Trinugroho, T. 2021 (23 Februari). “Tajuk Rencana: Momentum Merevisi UU ITE”. Dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/23/momentum-merevisi-uu-ite/>.
- Wiratraman, P. H. 2020 (21 Desember). “Menjaga Kebebasan Akademik”. Opini. *Kompas*.